

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Ali, Daud , Mohammad, 2000, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Firmansyah ,dkk, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI)*, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta, Penerbit Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiddiqie, Jimly, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute, Jakarta.
- Astomo, Putera 2014. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta:Thafa Media.
- Badjuru, Acmad, 2018, *Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*, Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).
- Danil, Ewi, 2019. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djazuli, H.A, 2017, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana.
- Djazuli,A, 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Prenada Media.

- Famzah, Andi , 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*, Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Fauzan, Achmad, 2005, *Perundang-undangan Lengkap tentang peradilan Umum, Peradilan Khusus, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Korupsi, Pengadilan Perburuhan (UU No. 2 Th. 2004), Pengadilan Pajak, Mahkamah Syariah, Mahkamah Pelayaran (plus PP No. 8 Th. 2004), dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Iqbal, Muhammad, 2007, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, Muhammad, 2016, *Fiqh Siyasah*, Jakarta:Kencana, 2016.
- Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara*, Surakarta:FK Hukum Sebelas Maret.
- Isrok, Dhia Al Uyun, *ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*. Malang: Universitas Brawijaya Pers.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1977, *al-Siyasat al-Syar'iyat*, Dar al-Anshor, Qahirat.
- Kusnardi, Moh, Ibrahim Harmail, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FF UL.
- Marzuki, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Mas`udi, Masdar Farid, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam* Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Maulana, Arif, Pratiwi Febri, Oky Wiratama, dkk, 2019, *Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi* Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Muslim, Mahmuddin. 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK)* Indonesia, Jakarta.
- Noeh, Munawar Fuad, 1997, *Islam Dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zihru'l Hakim, Cet. Pertama.

- Nurmawati, Made, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara*, Bali:Fakultas Hukum Unud.
- Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung:Refika, 2020.
- Oce Madril, 2018, Disertasi hukum : *Politik hukum presiden dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan*, Yogyakarta:UGM.
- Prodjodikono, Wirjono 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakjat.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1993, *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta:Raja Wali Pers.
- Salim, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Citapustaka.
- Setiawan, Adam, 2019, *KPK dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jakarta:Republika Nasional.
- Shiddieqy Hasby Ash, 2017, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah.
- Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Strauss, David A, 2011, *The living Constitution (Inalienable Rights)*, New York:Oxford University.
- Sugono, Dendy, dkk. 2008. *Kanus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Suny, Ismail,1987, *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Unismu Jakarta.
- Tauda, Gunawan A, 2012, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Yogyakarta:Genta Press.

Thaib, Dahlan, 2002, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Trisulo, Evy D. 2015. *Kajian Kelembagaan*. Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi.

Ulya, Zaky, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara (kajian teoritis kedudukan lembaga negara pasca reformasi)*, Langsa: Universitas Samudra.

Wahyono, Padmo, 2003; *Ilmu Negara*, Indo Hil. Co, Jakarta.

Zahra, Muhammad Abu, 2003 *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pirdaus.

#### **b. Undang-Undang**

Peraturan komisi pemberantasan korupsi RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.

#### **c. Al-Qur`an**

Kementerian Agama RI, 2012, *Al-Quran dan Terjemanya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Departemen Agama RI, 1984, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, Jakarta:  
Departemen Agama.

#### **d. Jurnal**

Arifin Firmansyah, et. al., , sebagaimana dikutip oleh Rizky Argama, 2007, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu , Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ismail, "*Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.01 No.02, (2013).

James E, Alt And David Dreyer Lassen, 2010, "*Enforcement And Public Corruption: Evidence From Us States, Epru Working Paper Series*", (diterjemahkan oleh Ida Indriyana dalam Jurnal Mimbar Hukum UGM).

Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali, "*Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*", Jurnal Perspektif, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Mei.

Monteiro, M.J., 2012. *Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-42 No.2.

Novianto M. Hantoro, 2017, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Hak Angket DPR RI, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Komplek MPR/DPR/DPD*.

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D, Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H, Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H, M. Nur Sholikin, S.H, 2016 Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap

*Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:Indonesia Corruption Watch.

Revisi UU KPK Antara Melemahkan Dan Memperkuat Kinerja KPK Oleh : Ahmad Jazuli\* Naskah diterima: 18 Februari 2016; disetujui: 10 Maret 2016.

Ujang Charda S., “*Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik*”, Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 No.02 September (2012).

**e. Website**

Cita Riset, Perbandingan UU Kpk Sebelum Dan Setelah Perubahan Didasarkan Pada Rapat Paripurna Ke-9 Tahun 2019 Di Ruang Sidang Paripurna Nusantara Ii, Kompleks Dpr/Mpr, Jakarta, Pada Hari Selasa, 17 September 2019.

CSIS, Press Release “Persepsi dan Pengalaman Masyarakat terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia.

Kompas, 8 September 2019, diakses 20 september 2020.

Law.uui.ac.id, Idul Rishan, Ketika KPK Dibawah Kuasa Presiden diakses pada 5 november 2021.

<https://www.alinea.id/nasional/kpk-tahan-2-tersangka-perkara-ktp-el> diakses tanggal 19 Februari 2022.

Media Indonesia, diakses 11 September 2020.

CNN Indonesia.com, diakses 15 September 2020

Liputan6.com, 16 September 2019 diakses 09 november 2020.

Mata nazwa, Nazwa Shihab, Revisi Undang-Undang KPK , 18 September 2019.

Indonesia Sarang Korupsi Sistemik, Berita Indonesia, 17 November 2017.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hapsah Riskiani Hasibuan, lahir di Sibaruang pada tanggal 01 November 1998, anak pertama dari enam bersaudara, putri dari pasangan ayahanda Nasron Efendi Hasibuan dan ibunda Rosidah Pohan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada usia 6 tahun di SD S 007 NU Sibaruang selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di Mts Al-Ahliyah Aek Badak selesai pada tahun 2013, dan Sekolah Lanjut Tingkat Akhir di MAN Siabu mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri jurusan Siyash (Hukum Tata Negara) di Universitas Islam Negeri Sumatera utara Medan.

Adapun riwayat organisasi penulis adalah sebagai berikut : DEMAF Syariah Anggota (2016-2017), IMA MADINA Anggota (2017-2018), FORMADIKSI UIN SU Kabid Seni dan Budaya (2018-2019), PERMADANI DIKSI WILAYAH 1 Sekretaris Bidang IPTEK (2018-2020), PMII Warga (2019)

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan do`a dalam menjalani aktivitas akademik diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Revisi Undnag-Undnag (Analisis Fiqh Siyash Terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”**.